

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 13-15 Maret 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas.com	Sabtu, 13 Maret 2021	Depok Akan Ajukan Rencana Revitalisasi TPA Cipayung ke Kementerian PUPR	Kepala DLHK Kota Depok Ety Suryahati mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan rencana revitalisasi ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai tahap awal. "Jika Kementerian PUPR setuju dan memberikan anggaran, maka detailed-engineering design (DED) akan segera kami proses. Mudah-mudahan revitalisasi terhadap TPA Cipayung bisa segera dilakukan tahun depan," tutur Ety. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/12/16044121/depok-akan-ajukan-rencana-revitalisasi-tpa-cipayung-ke-kementerian-pupr.
2	Suara.com	Sabtu, 13 Maret 2021	Kementerian PUPR Targetkan Penataan Akses DPSP Borobudur Rampung 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penataan akses kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur selesai pada tahun ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan untuk penataan kawasan seperti trotoar, jembatan, pedestrian, memperhatikan aspek estetika, karena berada di kawasan heritage Candi Borobudur dan harus ada semacam persetujuan dari Unesco. https://www.suara.com/bisnis/2021/03/13/164448/kementerian-pupr-targetkan-penataan-akses-dpsp-borobudur-rampung-2021 https://www.antaranews.com/berita/2041078/pemerintah-targetkan-penataan-akses-ke-candi-borobudur-rampung-2021
3	Antaranews.com	Sabtu, 13 Maret 2021	Program Sarhunta diyakini tingkatkan perekonomian kawasan Borobudur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program Sarana Hunian Pariwisata diyakini selain mengubah hunian warga menjadi lebih layak huni, juga akan meningkatkan perekonomian sekitar Candi Borobudur. https://www.antaranews.com/berita/2041438/program-sarhunta-diyakini-tingkatkan-perekonomian-kawasan-borobudur
4	lnews.com	Sabtu, 13 Maret 2021	Tomohon hinterland KSPN Likupang-Manado-Bitung	Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia meminta Kota Tomohon segera berbenah. Kota Tomohon berfungsi sebagai hinterland Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Manado-Likupang-Bitung.

				https://sulut.inews.id/berita/segera-berbenah-tomohon-hinterland-kspn-likupang-manado-bitung . https://www.antaranews.com/berita/2041578/tomohon-hinterland-kspn-likupang-manado-bitung .
5	Akurat.co	Sabtu, 13 Maret 2021	Kementerian PUPR Awali Program Vaksinasi Covid-19 bagi ASN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kepada Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR. Kegiatan ini diawali di kantor pusat yang terletak di bilangan Jakarta Selatan. https://akurat.co/ekonomi/id-1285175-read-kementerian-pupr-awali-program-vaksinasi-covid-19-bagi-asn
6	beritasatu.com	Sabtu, 13 Maret 2021	Kempupera: Infrastruktur Pendukung KEK Likupang Siap Digunakan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menyampaikan infrastruktur berupa jalan akses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara sudah siap digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi jangka panjang. https://www.beritasatu.com/ekonomi/745415/kempupera-infrastruktur-pendukung-kek-likupang-siap-digunakan

Judul	Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Tol	Tanggal	13 Maret 2021
Media	Kompas (Halaman, 10)		
Resume	Merujuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kenaikan tarif jalan tol dibutuhkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Tarif jalan tol disesuaikan dengan inflasi setiap dua tahun sekali. Evaluasi dilakukan oleh BPJT dan direkomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		

Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Tol

Kenaikan tarif jalan tol diharapkan tidak sekadar untuk mengejar keuntungan dan pengembalian investasi. Pelayanan publik perlu lebih diutamakan.

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan tarif jalan tol pada tahun ini dinilai tidak beralasan mengingat standar pelayanan paling minimum belum dijalankan pengelola jalan tol. Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif jalan tol dan memprioritaskan pembenahan pelayanan publik ketimbang mengejar pengembalian investasi.

Curah hujan tinggi pada Februari 2021 mengakibatkan banjir di 14 ruas jalan tol di Jabodetabek dan merugikan pengguna jalan. Jumlah jalan tol yang terdampak itu bertambah dibanding yang terdampak banjir pada Januari 2020. Saat itu, 11 ruas tol yang tergenang banjir.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menerima laporan pengaduan dari konsumen yang meminta agar tarif tol pada tahun ini tidak dinaikkan selama pengelola jalan tol tidak membenahi pelayanannya dalam mengelola jalan tol.

Menanggapi pengaduan yang diteruskan KKI, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Rizal E Halim, Jumat (12/3/2021), mengatakan, kasus banjir pada awal 2021 sebenarnya hanya bagian kecil dari berbagai persoalan pengelolaan jalan tol yang terjadi selama ini.

"Tak usah menunggu banjir, setiap hari sebenarnya kita sudah merasakan pelayanan di jalan tol yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum," ujarnya dalam diskusi publik perlindungan konsumen di Jakarta.

BPKN akan menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut dan meminta Presiden menunda sementara kenaikan tarif jalan tol, tahun ini. BPKN juga meminta agar perluasan jalan

tol ke depan lebih saksama dilakukan. Perluasan jalan tol harus diikuti dengan kecakapan dan kepatuhan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam memenuhi standar pelayanan.

"Pertama, sangat tidak adil jika tarif jalan tol dinaikkan karena alasan pandemi, sementara masyarakat juga terdampak pandemi. Kedua, sangat tidak adil menaikkan tarif ketika layanannya belum memenuhi standar regulasi yang sudah ada," kata Rizal.

Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, beberapa aspek yang perlu dibenahi adalah kondisi jalan tol, khususnya drainase di seluruh ruas jalan tol yang tidak boleh ada endapan, kondisi bahu jalan yang tidak boleh retak dan berlubang, serta kecepatan tempuh rata-rata di jalan tol yang harus dijaga pada 40-60 kilometer (km) per jam.

Rusak dan macet

Ketua KKI David ML Tobing menyoroti kondisi drainase yang tidak berfungsi baik pada saat banjir sehingga menyebabkan jalan tol tergenang dan konsumen dirugikan. Di luar banjir, masih ada ruas-ruas jalan tol yang dibiarkan berlubang dan rusak dan tidak kunjung diperbaiki.

Pengelola jalan tol juga dinilai gagal menjaga situasi jalanan tetap lancar dan mengatur arus keluar-masuk kendaraan. Sebab, rata-rata kecepatan di ruas jalan tol saat ini adalah 5-10 km per jam, jauh di bawah standar ideal, yaitu 40-60 km per jam.

Merujuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kenaikan tarif jalan tol dibutuhkan untuk pengemba-

lian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Tarif jalan tol disesuaikan dengan inflasi setiap dua tahun sekali. Evaluasi dilakukan oleh BPJT dan direkomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut David, kenaikan tarif jalan tol tidak tepat diberlakukan ketika standar pelayanan minimum belum dijalankan oleh pemerintah dan badan usaha milik negara. "Jangan hanya memikirkan kenaikan tarif untuk pengembalian investasi. Pengelola tol harus sadar bahwa yang mereka lakukan itu pelayanan publik, bukan sekadar mengejar untung," katanya.

Kewajiban

Penyesuaian tarif jalan tol pada 2021 akan dilakukan bertahap untuk 59 ruas jalan tol, yaitu pada April 2021, Agustus 2021, dan Desember 2021. Sebelumnya, pada Januari 2021, tarif untuk delapan ruas jalan tol sudah dinaikkan.

Kepala Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II BPJT Joko Susanto mengatakan, penyesuaian tarif harus dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang. "Ini memang kewajiban kami ke badan usaha untuk menyesuaikan tarif tol berdasarkan inflasi setiap 2 tahun sekali," katanya.

Penyesuaian tarif jalan tol, lanjut Joko, seharusnya sudah dilakukan sejak 2020, khususnya untuk delapan ruas jalan tol yang tarifnya sudah dinaikkan pada Januari 2021. Kenaikan tarif itu sebelumnya ditunda akibat Covid-19. Saat ini, BPJT memutuskan untuk menyesuaikan tarif lantaran lalu lintas mulai kembali normal dan guna menjaga iklim investasi.

Kenaikan tarif tersebut tidak

bisa serta-merta ditunda setelah telanjur diberlakukan. Namun, kondisi pada tahun ini bisa menjadi dasar evaluasi untuk penyesuaian tarif dua tahun mendatang. "Kalau, misalkan, setelah tarif dinaikkan lalu jalan masih berlubang dan rusak, itu akan menjadi dasar penghitungan kami untuk penetapan tarif dua tahun lagi," katanya.

Banjir yang terjadi di 14 ruas jalan tol pada Februari 2021, menurut Joko, bukan salah pengelola. Pengelola sudah memperbaiki saluran drainase, serta mengkaji potensi dan penanganan banjir sejak Agustus 2020. Namun, ada banyak hal di luar kendali BPJT sehingga kenaikan titik banjir pada 2021 bukan berarti karena kelalaian BPJT.

Joko menambahkan, dari 14 titik yang tergenang, sebanyak 8 titik banjir karena luapan dari sungai atau jalan arteri yang tidak mampu dibendung. Sementara lima titik terdampak banjir karena sedang ada pembangunan konstruksi jalan tol. Adapun satu titik tergenang banjir karena memang kapasitas saluran drainasenya tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi.

Selain kenaikan tarif, pada tahun ini BPJT juga akan mengimplementasikan sejumlah teknologi di jalan tol. Teknologi itu, antara lain, sistem jalan tol tanpa henti untuk multilajur (ML-FF), penimbangan bobot kendaraan dalam kondisi bergerak (WIM), kecerdasan buatan untuk memprediksi lubang dan retakan di jalan tol, serta pemodelan informasi bangunan (BIM). Implementasi teknologi tersebut diharapkan memberikan beragam manfaat, kemudahan, dan menjamin keselamatan pengguna jalan. (AGE)

Judul	Padat Karya Tunai Dongkrak Daya Beli	Tanggal	15 Maret 2021
Media	Media Indonesia, Halaman 2		
Resume	Dana yang dikeluarkan telah mencapai 7,5% dari Rp23,24 triliun atau sekitar Rp1,5 triliun,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Endra Saleh Atmawidjaja di Jakarta, kemarin. Ada 20 kegiatan PKT tahun ini untuk menyerap jutaan tenaga kerja tersebut. Sebagian besar tenaga kerja tidak harus memiliki keterampilan khusus untuk bergabung dalam proyek-proyek PKT.		

Padat Karya Tunai Dongkrak Daya Beli

Pemprov Jambi mengadakan program padat karya tunai untuk pengadaan jaring nelayan dengan melibatkan pelaku UMKM.

M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com

HINGGA Jumat (12/3), proyek padat karya tunai (PKT) di beberapa desa di Tanah Air sudah menyerap tenaga kerja 120 ribu orang. Jumlah itu setara 10% dari target yang menyasar 1,23 juta tenaga kerja dengan besar anggaran mencapai Rp23,24 triliun.

“Dana yang dikeluarkan

telah mencapai 7,5% dari Rp23,24 triliun atau sekitar Rp1,5 triliun,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Endra Saleh Atmawidjaja di Jakarta, kemarin.

Ada 20 kegiatan PKT tahun ini untuk menyerap jutaan tenaga kerja tersebut. Sebagian besar tenaga kerja tidak harus memiliki keterampilan khusus untuk bergabung dalam

proyek-proyek PKT. Setiap kelurahan yang melaksanakan program ini akan menerima dana Rp300 juta yang digunakan untuk pekerjaan proyek fisik dan membayar tenaga kerja.

“PKT ini pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan alat berat dan juga tidak berisiko tinggi, misalkan pemeliharaan jalan, mengecat trotoar, pemeliharaan jembatan, drainase, dan membersihkan tol. Pemeliharaan tol saja dianggarkan Rp800 miliar,” lanjut Endra.

PKT di Kementerian PU-Pera, antara lain program infrastruktur sumber daya air dengan anggaran Rp7,15

triliun dan menyerap 386.159 tenaga kerja di seluruh Balai Besar Wilayah Sungai di 34 provinsi.

Di sektor jalan dan jembatan, Ditjen Bina Marga menganggarkan dana Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.

Programnya dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang tersebar di 34 provinsi yang meliputi preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, dan membersihkan tol.

“Khusus proyek pembangunan rumah swadaya tenaga kerja sudah terserap 1.500 orang. Program ini diperkirakan menyerap tenaga kerja 378.460 orang dengan ang-

garan Rp4,11 triliun,” jelas Endra.

Pemberdayaan nelayan

Untuk mendorong perekonomian warga masyarakat di pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Jambi menggelar program padat karya tunai untuk pengadaan jaring nelayan melalui pemberdayaan pelaku UMKM.

“Polanya pemerintah menyediakan bahan jaring. Selanjutnya, UMKM yang memproduksi jaring tersebut agar dapat dimanfaatkan nelayan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jambi Temawisman, akhir pekan lalu.

Temawisman melanjutkan, melalui program tersebut, Pemprov Jambi menyediakan bahan berupa jaring untuk diolah UMKM menjadi jaring yang siap dimanfaatkan nelayan.

“Wilayah pesisir pantai itu seperti di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan perairan umum tersebar di kabupaten dan kota, di antaranya di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Kerinci, dan kabupaten lain,” ungkap Temawisman.

Selain memberikan bantuan kepada nelayan dan pembudi daya ikan, program tersebut juga bertujuan mengganti alat tangkap nelayan yang tidak ramah lingkungan menjadi menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

“Bantuan jaringnya kami sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk nelayan di laut dan budi daya ikan jenis jaringnya berbeda,” kata Temawisman. (Ant/X-3)

Realisasi Padat Karya Tunai (PKT) pada 2020 dan 2021

Pencapaian Program PKT 2020

- Mempekerjakan 631.723 orang.
- Realisasi target penyerapan tenaga kerja keseluruhan mencapai 98,86%.
- 13 program telah mencapai 100% target penyerapan tenaga kerja.

Pencapaian Program Padat Karya Tunai 2021 (hingga Maret 2021)

- Mempekerjakan **120 ribu** orang (10% dari target sebanyak 1,23 juta orang)
- Anggaran dikeluarkan **Rp1,5 triliun** dari Rp23,24 triliun.
- Pada program pembangunan rumah swadaya menyerap **1.500 pekerja** dari target 378.460 pekerja.

Beberapa Serapan Tenaga Kerja pada 13 Program PKT yang Mencapai Target 100%

Bidang Sumber Daya Air ▶ 200.000 tenaga kerja di 10.000 lokasi.	TPS 3R ▶ 2.100 pekerja.
Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan ▶ 42.215 pekerja.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat ▶ 48.060 pekerja.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ▶ 15.000 pekerja.	Sanitasi Berbasis Masyarakat ▶ 15.705 pekerja.
Penataan Kota Kumuh ▶ 12.979 pekerja.	Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ▶ 225.919 pekerja.
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ▶ 228 ribu unit rumah tidak layak huni.

Beberapa Program PKT 2021

Infrastruktur Sumber Daya Air • Alokasi anggaran Rp7,15 triliun • Target tenaga kerja 386.159	Bidang Jalan dan Jembatan • Alokasi anggaran Rp6,69 triliun • Target tenaga kerja 273.603 orang	Bidang Pemukiman • Alokasi anggaran Rp5,29 triliun • Target tenaga kerja 194.471
--	--	---

Sumber: Kementerian PUPRI, Litbang M/I Grafik: SEHO

Sumber: Kementerian PUPRI, Litbang M/I Grafik: SEHO